

# EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI DI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (PNRI) PADA NASKAH NUSANTARA

Ridha Anggi Nurkholisha<sup>\*)</sup>, Lydia Christiani

*Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi hasil evaluasi kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) pada Naskah Nusantara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PNRI memiliki kebijakan pengembangan koleksi tertulis yang digunakan sebagai acuan untuk kegiatan pengembangan koleksi yang berisi cakupan, pengumpulan, dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan Naskah Nusantara. Setelah dilakukan analisis SWOT dalam penelitian ini ditemukan bahwa PNRI memiliki kelemahan dari lingkungan internal yang terutama berkaitan dengan anggaran dana dan ancaman dari lingkungan eksternal terutama yang berkaitan dengan tradisi dan ritual budaya. PNRI juga memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan koleksi Naskah Nusantara yaitu telah adanya landasan hukum yang mendukung proses pengembangan koleksi Naskah Nusantara serta telah adanya sumber daya manusia yang memahami tentang Naskah Nusantara dengan latar belakang pendidikan Filologi untuk memperbesar akses terhadap konten informasi pada Naskah Nusantara. Analisis SWOT yang dibuat penyesuaian logisnya dapat menjadi masukan bagi PNRI dalam mengevaluasi kebijakan pengembangan koleksi di PNRI pada koleksi Naskah Nusantara untuk masa yang akan datang dengan dasar pertimbangan kekuatan dan peluang yang dimiliki PNRI dalam pengembangan koleksi Naskah Nusantara.

**Kata kunci:** pengembangan koleksi; kebijakan pengembangan koleksi; kebijakan pengembangan koleksi naskah nusantara; analisis SWOT

## Abstract

*[Title: Evaluation Of Collection Development Policy At The National Library Of The Republic Of Indonesia (PNRI) On The Nusantara Manuscript]. This study aims to find out the description of the results of the collection development policy evaluation at the National Library of the Republic of Indonesia (PNRI) on the Nusantara Manuscript. The method used in this research is descriptive qualitative research method with case study approach. Data collection techniques are observation, interviews and document study. The results of this study found that PNRI has a written collection development policy that is used as a reference for collection development activities that contain coverage, collection, and collaboration with parties related to the Nusantara Manuscript. After the SWOT analysis in this study found that PNRI has a weakness of the internal environment which is primarily a budget, and threats from the external environment, especially cultural traditions and rituals. PNRI also has the strengths and opportunities that can be utilized in the development of the Nusantara Manuscript collection, namely the existence of a legal foundation that supports the development process of the Nusantara Manuscript collection and the existence of human resources who understand the Nusantara Manuscript with a Philological education background to increase access to information content on the Nusantara manuscript. SWOT analysis can be an input for PNRI in evaluating collection development policies in PNRI in the Nusantara Manuscript collection for the future based on consideration of the strengths and opportunities that PNRI has in developing the Nusantara Manuscript collection.*

**Keywords:** *collection development; collection development policy; nusantara manuscript collection development policy; SWOT analysis*

---

<sup>\*)</sup>Penulis Korespondensi.

E-mail: ridhaangginurkholisha@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Perpustakaan memiliki peran menjalankan fungsi sebagai pelestari dokumen literal, yang mana salah satunya adalah naskah kuno. Sudarsono (2009: 13) mengartikan naskah kuno sebagai “darah kehidupan sejarah”. Pengertian di atas menunjukkan bahwa naskah kuno termasuk dalam warisan budaya yang bernilai tinggi. Warisan budaya sendiri terbagi menjadi tiga kelompok yakni warisan budaya berupa alam, warisan budaya berupa peninggalan benda-benda yang mengandung nilai budaya (*cultural heritage*), dan warisan budaya berupa aktivitas atau kegiatan yang ada dalam masyarakat atau disebut *cultural place* (Sukaesih, 2016: 178). Berdasarkan pengelompokan tersebut naskah kuno termasuk dalam warisan budaya yang berupa peninggalan benda atau disebut juga *cultural heritage*, karena dilihat dari bentuknya, naskah kuno terdiri dari aksara dan bahasa daerah yang dituangkan pada daun tal atau lontar, bambu, rotan, daun nipah, tanduk, kulit kayu, tulang, kulit binatang, *dluwang*, kertas Eropa, dan kain (Suprihati dalam zulfitri, 2014: 82). Naskah kuno milik bangsa Indonesia adalah suatu aset yang berharga untuk Indonesia. Bahar dan Mathar (2015: 91) menyebutkan bahwa naskah kuno merupakan hasil pemikiran masyarakat masa lampau pada suatu wilayah yang dituangkan dalam tulisan, baik berupa nilai sejarah, kebiasaan, ilmu pengetahuan, adat istiadat, maupun ilmu pengetahuan yang berusia kurang lebih lima puluh tahun yang keberadaannya sendiri perlu diperhatikan.

Naskah kuno yang dihasilkan sebagai produk kegiatan manusia di kalangan masyarakat tertentu di kawasan Nusantara pada masa silam disebut Naskah Nusantara (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2013: 9). Kandungan informasi yang ada dalam Naskah Nusantara merupakan refleksi perjalanan sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Keberadaan Naskah Nusantara sebagai warisan budaya yang ada pun memiliki perannya tersendiri dalam dunia perpustakaan dan informasi di masa mendatang demi perkembangan keilmuan, di mana banyak pihak yang harus bertanggung jawab akan keberadaan salah satu bentuk warisan budaya ini. Seperti yang tertuang pada Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebutkan bahwa masyarakat, pemerintah, dan tentunya ialah lembaga di bidang perpustakaan dan informasi memiliki tanggung jawab melestarikan *cultural heritage*, yang mana salah satunya adalah naskah kuno. Namun yang sangat disayangkan Naskah Nusantara milik bangsa ini masih banyak yang sulit terjamah, karena sebagian besar naskah terbatas pada kepemilikan masyarakat, bahkan yang telah diketahui banyak orang, keberadaan naskahnya masih banyak yang di luar negeri yang mengakibatkan sulitnya terorganisir. Dari data yang ada

di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) tahun 2012, Naskah Nusantara setidaknya tersebar di 60 negara. Belanda dan Inggris adalah negara yang paling banyak menyimpan Naskah Nusantara, keberadaan Naskah Nusantara yang ada di Belanda mencapai 26.000 naskah. Sedangkan yang ada di PNRI hanya sekitar 10.169 naskah, dan tercatat di Keraton Yogyakarta sedikitnya 7.000 naskah berada di Inggris dan Belanda, padahal naskah yang tersimpan di Museum Sonobudoyo Yogyakarta hanya 363 naskah dan belum lagi Naskah Nusantara yang masih tersebar di tangan masyarakat tanpa terdata keberadaannya (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2012).

Masih rendahnya penghargaan terhadap warisan budaya, faktor ekonomi yang menyebabkan naskah diperjualbelikan pada pihak asing, kepedulian pemerintah terhadap warisan budaya yang belum menjadi komitmen nyata serta minimnya anggaran yang didapatkan PNRI untuk pengembangan koleksi Naskah Nusantara adalah hal-hal yang menyebabkan Naskah Nusantara masih dalam keadaan terbengkalai pada saat ini. Perpustakaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melestarikan naskah kuno (*cultural heritage*) melakukan kegiatan pengelolaan yang di dalamnya termasuk kegiatan pengembangan koleksi naskah kuno, demi tercapainya visi dan misi lembaga itu sendiri. Menurut Michael R. Gabriel (dalam Rahmanto, 2011: 7) pengembangan koleksi merupakan proses membangun koleksi perpustakaan secara sistematis untuk memenuhi keperluan pembelajaran, pengajaran, penelitian, rekreasi, dan kebutuhan lainnya dari para pengguna perpustakaan. Pernyataan tersebut sangat jelas dipaparkan bahwa pengembangan koleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua koleksi dapat ditata, dirawat, dilestarikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pemustaka dalam cara yang tepat waktu dan ekonomis, menggunakan sumber daya informasi yang diolah oleh bagian dalam maupun luar organisasi.

Bernhard (dalam Winoto, 2016: 122) menyebutkan beberapa tujuan dari pengembangan koleksi yakni menambah jumlah koleksi atau mengharapakan untuk memilikinya, memperoleh koleksi yang ditulis oleh pengarang yang populer di kalangan pembaca, memenuhi kewajiban perpustakaan untuk menunjang pencapaian tujuan lembaga, menambah nilai koleksi melalui pengadaan bahan pustaka yang aktual dan bahan pustaka dasar dalam suatu subjek penting, memperoleh bahan-bahan pustaka atau buku-buku referensi yang mampu menyuplai informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, melengkapi informasi dalam subjek yang masih kurang atau belum ada sama sekali, atau belum mencukupi kebutuhan pemakai. Menurut Sutarno NS (dalam Suharti, 2017: 60) pengembangan koleksi juga memiliki manfaat yakni membantu

menetapkan metode untuk pengadaan koleksi, membantu perencanaan bentuk kerjasama baik pengadaan, membantu mengidentifikasi koleksi yang diperlukan, membantu merencanakan anggaran dan sasaran pengembangan, serta membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan koleksi. Menurut Evans (dalam Almah, 2012: 35) proses pengembangan koleksi sendiri terdiri dari enam komponen kegiatan, yaitu analisis masyarakat, kebijakan seleksi, seleksi, pengadaan, penyiangan, evaluasi.

Maka dari itulah PNRI sebagai perpustakaan nasional mulai menjalankan fungsinya sebagai “Pusat Pernaskahan Nusantara” sejak tahun 2012. Pusat Pernaskahan Nusantara merupakan upaya PNRI dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan Pasal 6 ayat 1b yang menyebutkan bahwa, “menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional”. Bahkan dalam Undang-Undang tersebut diterakan pada bagian penjelasan yang menyebutkan bahwa, “Sebagian besar naskah kuno masih dimiliki masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya pelestariannya, perlu didaftarkan ke Perpustakaan Nasional”. Urgensi pelestarian naskah kuno sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan perlu ditindaklanjuti oleh PNRI dalam suatu penyusunan kebijakan pengembangan koleksi yang mengakomodir kekhususan dari naskah kuno. Pengembangan koleksi yang efektif berasal dari perencanaan baik untuk memperbaiki kelemahan koleksi dan memelihara kekuatan koleksi yang ada sesuai dengan pencapaian tujuan lembaga, tentunya berasal dari kebijakan yang baik pula. Maka dari itu diperlukan kebijakan dalam kegiatan pengembangan koleksi demi kepentingan pengguna perpustakaan.

Kebijakan yaitu langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan semua strategi perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Sutarno, 2006: 153). Salah satu hal yang perlu diatur dalam sebuah kebijakan di perpustakaan adalah koleksi. Sebab koleksi sebagai sumber daya informasi merupakan komponen utama dalam perpustakaan. Kebijakan yang ditujukan untuk menjaga kualitas sumber daya informasi di perpustakaan disebut dengan kebijakan pengembangan koleksi. Sutarno juga menyebutkan bahwa kebijakan pengembangan koleksi biasanya dalam bentuk tertulis secara rinci, yang telah disepakati (2006: 153). Kebijakan tertulis tersebut digunakan untuk panduan kegiatan pengembangan koleksi itu sendiri. Kegiatan pengembangan koleksi memiliki tujuan dan biasanya melibatkan sumberdaya yang ada di perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan suatu acuan yang dapat menjadi pedoman agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan pengembangan koleksi di perpustakaan.

Untuk membina koleksi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap perpustakaan sebaiknya memiliki pedoman tertulis untuk pengembangan koleksi perpustakaan yang biasa disebut dengan kebijakan pengembangan koleksi (Sukarman dalam Putra, 2000: 19). Lebih lanjut, Sukarman menyatakan bahwa kebijakan pengembangan koleksi adalah berbagai ketentuan yang disepakati oleh pimpinan perpustakaan dan pihak terkait lainnya, dalam upaya menambah dan memperluas koleksi perpustakaan.

Sutarno (2006: 153) memaparkan asas-asas yang mendasari kebijakan pengembangan koleksi yang perlu memperhatikan relevansi koleksi serta berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Pemenuhan kebutuhan koleksi dalam hal ini meliputi kelengkapan koleksi, kemutakhiran, serta kerjasama dengan pihak eksternal demi pendayagunaan koleksi. Hal inilah yang menjadi dasar dalam kebijakan pengembangan koleksi, mayoritas berisi tentang pengaturan terkait pengadaan koleksi, sebab pengadaan koleksi merupakan ujung tombak yang dapat menjaga siklus kemutakhiran sumber daya informasi. Kebijakan koleksi secara garis besar memiliki fungsi yang dibagi menjadi tiga kelompok yakni, fungsi perencanaan, fungsi komunikasi internal, dan fungsi komunikasi eksternal (Yulia dalam Imron, 2011: 21). Ketiga fungsi tersebut berorientasi pada beberapa faktor internal dan eksternal, seperti sumberdaya, pemustaka, anggaran, masyarakat, serta lembaga eksternal yang terkait. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kerja sama antar perpustakaan, pemerintah, serta lembaga masyarakat atau perorangan yang memiliki koleksi.

Kebijakan bersifat penting dan memiliki manfaat yang besar untuk kelangsungan kegiatan pengembangan koleksi. Imron (2009: 22) memaparkan manfaat dari dibuatnya kebijakan. Kebijakan dapat menjadi dokumen untuk sosialisasi kepada masyarakat sebagai standar untuk menginformasikan kepada pemustaka tentang sifat dan ruang lingkup koleksi, menginformasikan prioritas pengoleksian, mendorong pemikiran tentang prioritas organisasi untuk koleksi naskah, menghasilkan komitmen pada tingkat tertentu sesuai dengan sasaran perpustakaan serta menentukan standar untuk materi yang bisa masuk daftar koleksi dan mana yang tidak masuk dalam pengadaan. Memberikan sebuah sarana pelatihan dan orientasi bagi staf baru dengan menjamin konsistensi dari waktu ke waktu walaupun staf pengelola berganti. Memberikan pedoman kepada staf dalam pengambilan keputusan. Membantu dalam penyiangan dan evaluasi koleksi.

Manfaat kebijakan pengembangan koleksi seperti yang disebutkan di atas tidak hanya berdampak pada kegiatan itu sendiri, namun juga akan berdampak langsung pada perpustakaan terkait. Menurut Futas (dalam Rahmanto, 2011: 13) proses pembuatan kebijakan pengembangan koleksi dimulai oleh

sekelompok orang yang peduli dengan masa depan perpustakaan, sehingga nantinya akan tercipta layanan perpustakaan yang prima dengan menggunakan anggaran dana secara bijaksana. Pembuatan kebijakan tentunya perlu memperhatikan perumusan hal yang perlu dilakukan dan diselesaikan. Pengumpulan berbagai jenis informasi untuk pendukung pembuatan keputusan juga perlu diperhatikan. Hal terpenting dalam proses pembuatan kebijakan pengembangan koleksi ialah memformulasikan dan menuangkan dalam bentuk dokumen kebijakan yang disepakati bersama.

Kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan secara terarah, memerlukan adanya ketentuan yang jelas sebagai pegangan dan pelaksana lainnya dalam pengembangan koleksi. Menurut Qalyubi (dalam Rahmanto, 2011: 9) kebijakan pengembangan koleksi perlu dilakukan secara terarah, dan harus disusun secara tertulis. Kebijakan pengembangan koleksi pengembangan koleksi yang tertulis harus menjadi dokumen publik yang bisa di akses oleh siapapun. Kebijakan tertulis yang baik memerlukan elemen-elemen yang tersusun agar terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Menurut Disher (dalam Rahmanto, 2011: 14) terdapat beberapa elemen seperti pendahuluan; visi, misi, dan tujuan; pemustaka; penanggung jawab pengembangan koleksi; pernyataan kebebasan intelektual; kebijakan seleksi, prosedur dan prioritas; koleksi khusus; penyiangan; hadiah; hubungan kerjasama; serta penanganan keluhan dan tantangan ke depan perlu dijelaskan dalam kebijakan pengembangan koleksi.

Kebijakan pengembangan koleksi yang seharusnya memang bersifat terarah dan tertulis agar dapat tetap pada konsekuensinya. Kegiatan bersifat *cyclical* atau terus menerus (Evans dalam Winoto, 2016: 123). Kebijakan yang ada pada tiap rumusan pengembangan koleksi memang tidak selalu sama, tergantung pada jenis perpustakaan, struktur organisasi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh perpustakaan yang bersangkutan. Darmono (dalam Rahmanto, 2011: 16) mengatakan bahwa perbedaan kebijakan antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pembeda, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi yang berpengaruh pada kebijakan pendanaan, keadaan penerbitan, kebiasaan pemakai, sikap masyarakat, serta faktor-faktor lain yang bersifat lokal. Setiap kebijakan pengembangan koleksi yang dibuat tentunya diperlukan adanya perubahan karena bersifat *cyclical* dan perlu mengikuti perkembangan serta kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Beberapa hal telah dilakukan PNRI dalam mewujudkan “Pusat Pernaskahan Nusantara” sejak tahun 2012 hingga saat ini, dengan pembuatan kebijakan-kebijakan oleh PNRI sendiri. Koleksi Naskah Nusantara masih menjadi bagian dari kebijakan

pengembangan koleksi secara umum yang disusun oleh PNRI, sementara itu naskah kuno adalah koleksi yang termasuk dalam kategori khusus yang perlakuannya tentu tidak dapat disamakan dengan koleksi umum lainnya. Seyogyanya koleksi Naskah Nusantara yang merupakan naskah kuno yang memiliki sifat kekhususan baik dari segi material maupun konten perlu beberapa pengaturan khusus yang sebaiknya dibakukan dalam bentuk kebijakan khusus. Maka dari itu kebijakan pengembangan koleksi memerlukan pembaharuan melalui evaluasi pada kebijakan pengembangan koleksi.

Kebijakan yang telah dibuat atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan sebuah kegiatan perpustakaan. Banyak kalangan berpendapat bahwa kebijakan tidak akan mencapai keberhasilan apabila dalam penerapannya jauh dari sesuai dengan tujuannya. Menurut Anderson (dalam Winarno 2008: 166) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui keberhasilan penerapan sebuah kebijakan yang telah diterapkan maka diperlukan adanya kegiatan evaluasi pada tahap akhir proses kebijakan. Namun, menurut Dunn (2000: 24) evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Evaluasi menekankan pada pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan hingga dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan serta identifikasi dampak suatu kebijakan pengembangan koleksi dapat dianalisa menggunakan berbagai cara, salah satunya menggunakan analisis “*SWOT analysis*” meliputi adanya kekuatan (*strenghten*), kelemahan (*weakness*), kesempatan atau peluang (*opportunity*), dan adanya ancaman atau disebut juga *threats* (Sutarno, 2006: 119). Terdapat pembagian faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam analisis *SWOT* ini yaitu kekuatan dan kelemahan berada dalam internal organisasi perpustakaan, sedangkan yang dapat dilihat

dari luar organisasi perpustakaan adalah kesempatan dan ancamannya.

Lebih lanjut, Pearche dan Robinson (dalam Jinnahatur, 2017: 37) mendefinisikan istilah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut, peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi yang merupakan pengganggu bagi posisi sekarang atau yang diinginkan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Analisis *SWOT* memiliki kegunaan dalam organisasi non-profit (Bryson, 2011: 155). Pernyataan Bryson tersebut dapat ditengarai bahwa analisis *SWOT* memiliki peran penting dalam proses perencanaan strategis karena dapat memberikan penilaian terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh organisasi, sehingga dapat memberikan keputusan yang cermat. Analisis *SWOT* dapat memberikan bahan evaluasi bagi organisasi apabila menghadapi kebijakan yang kurang tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

Perpustakaan dikategorikan sebagai organisasi *non-profit* yang dapat menggunakan analisis *SWOT* dengan kegunaan memberikan analisis situasi suatu organisasi yang dapat menunjukkan faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal, serta menunjukkan faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal. Dengan memahami kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal perpustakaan khusus, maka dapat diketahui faktor kekuatan dan kelemahan dari kondisi lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman dari kondisi lingkungan eksternal perpustakaan sehingga *SWOT* dapat membantu perpustakaan dalam merancang visinya ke depan sehingga semua program yang telah dibuat menjadi relevan dan inovatif. Ayuningtyas (2013: 65) mengemukakan bahwa untuk melakukan analisis *SWOT* perlu melalui tiga tahap, yaitu mengidentifikasi dan membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tahap kedua yaitu membuat matriks *SWOT* dengan memasukkan seluruh faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ke masing-masing tabel yang berbentuk *tabel IFAS (Internal Factors Analysis Summary)* dan *EFAS (External Factors Analysis Summary)*. Dan tahap ketiga yaitu membuat alternatif-alternatif strategi dari penyesuaian logis faktor yang terdapat dalam kolom-kolom matriks *SWOT*. Kekuatan utama analisis *SWOT* muncul dari kesesuaian faktor kekuatan dan kelemahan dari penilaian kondisi lingkungan internal dan faktor peluang dan ancaman dari penilaian kondisi lingkungan eksternal.

Rangkuti (1999: 20) menyampaikan ada empat kategori dasar penyesuaian yang dihasilkan matriks ini yaitu, *SO (Strengths-Opportunities)*, *ST (Strengths-Threats)*, *WO (Weaknesses-Opportunities)*, *WT (Weaknesses-Threats)*. Berikut ini adalah tabel matriks *SWOT* yang digunakan dalam pembuatan alternatif-alternatif strategi sebagaimana telah disebutkan:

**Tabel 1.** Tabel matriks *SWOT*

<i>IFAS</i> <i>EFAS</i>	<i>STRENGTHS (S)</i> Tentukan 5-10 faktor kekuatan dari penilaian kondisi lingkungan internal	<i>WEAKNESSES (W)</i> Tentukan 5-10 faktor kelemahan dari penilaian kondisi lingkungan internal
<i>OPPORTUNITIES (O)</i> Tentukan 5-10 faktor peluang dari penilaian kondisi lingkungan eksternal	<i>STRATEGI SO</i> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<i>STRATEGI WO</i> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang
<i>THREATS (T)</i> Tentukan 5-10 faktor Ancaman dari penilaian kondisi lingkungan eksternal	<i>STRATEGI ST</i> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<i>STRATEGI WT</i> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Pada proses perencanaan strategis pengembangan koleksi perpustakaan, matriks *SWOT* akan menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi seperti pada tabel diatas yang mengacu pada penilaian kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal perpustakaan dalam lingkup pengembangan koleksi perpustakaan. Data yang mendukung masing-masing faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dikelompokkan dalam tabel lembar kerja kekuatan-kelemahan (*S-W*) dan tabel lembar kerja peluang-ancaman (*O-T*). Lembar kerja *SWOT* ini menggambarkan setiap kondisi perpustakaan, kemudian dianalisis menggunakan model perumusan matriks *SWOT* yang berbentuk *tabel IFAS (Internal Factors Analysis Summary)* dan *EFAS (External Factors Analysis Summary)* yang digunakan untuk menyusun seluruh faktor strategi *SWOT* pengembangan koleksi perpustakaan.

Strategi *SO* atau strategi kekuatan-peluang dibuat berdasarkan jalan pikiran perpustakaan yang menggunakan seluruh kekuatan internal perpustakaan untuk memanfaatkan peluang eksternal yang sebesar-besarnya dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Penilaian kondisi lingkungan perpustakaan dilakukan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan

acaman pada suatu perpustakaan. Hasil analisis SWOT dapat dijadikan sebagai landasan dan pertimbangan untuk mempersiapkan, menata, dan melakukan tindakan yang lebih tepat dalam menghadapi permasalahan di perpustakaan, sehingga penyelenggaraan perpustakaan dapat memenuhi keinginan dan permintaan pemakai (Sutarno, 2006: 119). Analisis ini bertujuan untuk menyusun kembali kebijakan pengembangan koleksi di masa yang akan datang, sebagaimana pembentukan kebijakan yang baik ialah kebijakan yang melalui proses evaluasi di dalamnya. Salah satu kegiatan evaluasi yang dapat dilakukan ialah melalui analisis *SWOT*. Pendekatan analisis SWOT dapat membantu pihak manajemen untuk mengkategorisasi faktor internal dan eksternal yang terkait dengan objek kebijakan, yaitu pengembangan koleksi, yang mana kemudian hasil kategori faktor internal dan eksternal tersebut dijadikan landasan untuk memperbaiki konten sebuah kebijakan agar senantiasa mengikuti perkembangan jaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) pada Naskah Nusantara. Melalui Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya berhubungan dengan kebijakan pengembangan koleksi naskah kuno dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) terkait implementasi kebijakan pengembangan koleksi Naskah Nusantara.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh keseluruhan gambaran mengenai suatu peristiwa menurut pandangan manusia yang diteliti. Sementara penelitian deskriptif mencoba mencari gambaran yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia (Sulistyo-Basuki, 2006: 110). Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa seperti keadaan apa adanya dalam kebijakan pengembangan koleksi yang ada pada perpustakaan yang akan diteliti. Pendit (2003: 226) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak semata-mata menghasilkan deskripsi tetapi juga eksplanasi. yang kemudian dituangkan dalam bentuk narasi tertulis tentang objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan pengembangan koleksi Naskah Nusantara di Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sugiyono (2014: 235) menyebutkan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan

data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam. dan dokumentasi. Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam menguji keabsahan data yang didapat.

Setelah proses pengumpulan data telah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data yang telah didapat. Penulis mencatat data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data- data non-angka seperti, hasil wawancara atau catatan laporan bacaan dari buku-buku, artikel dan juga termasuk non-tulisan seperti foto, gambar, atau film. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 81) terdapat tiga aktivitas analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Ketiga tahapan analisis tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan narasi deskriptif tentang evaluasi kebijakan pengembangan koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Naskah Nusantara.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Naskah Nusantara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, PNRI antara lain mempunyai fungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan pusat jejaring perpustakaan. Selain itu PNRI juga memiliki tanggung jawab mengembangkan koleksi nasional, memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, dan melestarikan hasil budaya bangsa. Dalam mewujudkan pelestarian hasil budaya bangsa PNRI juga mengelola, menyediakan, melestarikan, dan mengembangkan koleksi Naskah Nusantara yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, dalam salah satu wujud integrasi tersebut. PNRI menyediakan koleksi perpustakaan berlandaskan pada visi, misi dan tujuan perpustakaan.

Penyediaan koleksi Naskah Nusantara sendiri merupakan salah satu upaya untuk melestarikan hasil budaya bangsa Indonesia. PNRI mengelola sepuluh ribu seratus enam puluh tiga naskah cetak yang telah terdata, serta memiliki sejumlah naskah salinan noncetak. Bentuk dari naskah tersebut memiliki variasi sesuai dengan media yang tersedia di setiap daerahnya seperti bambu, lontar, kayu, kulit kayu, dan nipah. Naskah yang dikelola dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu Naskah Sejarah, Naskah Silsilah, Naskah Hukum, Naskah Sastra, Naskah Piwulang, Naskah Islam, Naskah Primbon, Naskah Ilmu Bahasa, Naskah Musik, Naskah Tari-Tarian, Naskah Adat Istiadat, dan Naskah Ilmu Pengetahuan.

Dalam upaya pelestarian Naskah Nusantara sendiri salah satunya ialah dengan adanya pusat pengembangan bahan pustaka yang tujuannya sesuai dengan dengan Pusat Pernaskahan Nusantara. Kegiatan pengembangan koleksi naskah kuno sendiri memiliki manfaat dalam mewujudkan PNRI sebagai Pusat Pernaskahan Nusantara melalui identifikasi, akuisisi, inventarisasi, dan pengolahan naskah agar dapat dilestarikan dan didayagunakan. Beberapa tujuan yang ada dari kegiatan ini adalah mengumpulkan naskah yang tersebar Indonesia maupun luar negeri melalui pembelian, hibah, maupun alih media. Mendata dan mengolah naskah untuk mewujudkan pangkalan data yang lengkap. Serta menjalin kerjasama antar instansi, organisasi masyarakat maupun perorangan dalam penyelamatan naskah kuno dari kepunahan.

Proses pengembangan koleksi tidak terlepas dari kegiatan pengadaan. Naskah-naskah tersebut yang dikelola oleh PNRI hingga saat ini adalah naskah yang melalui proses akuisisi oleh PNRI dan pihak terkait lainnya. Kegiatan pengadaan yang dilakukan untuk koleksi Naskah Nusantara berbeda dengan pengadaan yang dilakukan untuk koleksi monograf dan lainnya. Penyajian informasi dalam bahasa atau aksara yang berbeda dari tiap daerah asal Naskah tersebut mempengaruhi kegiatan pengadaan, yang mana merupakan ujung tombak dari pengembangan koleksi Naskah Nusantara itu sendiri.

PNRI melakukan pengadaan dengan sebagian besar dari kegiatan pembelian dan hibah dari instansi lain yang terkait. Proses pengadaan sendiri terdiri dari beberapa aktivitas yang tercantum pada *Standard Operating Prosedur* (SOP) Kelompok Kerja Naskah Kuno yakni, Pemberian arahan dan bimbingan, Pembuatan rencana operasional (kerangka acuan) seleksi, Pengesahan rencana operasional (kerangka acuan) hunting, Pengumpulan informasi melalui kegiatan identifikasi naskah kuno, Penyusunan daftar seleksi, Seleksi, Penyusunan rencana pengadaan, Persetujuan atau pengesahan rencana Pengadaan, pengadaan, Pesanan hasil pengadaan datang, Periksa Daftar Pesanan dan Fisik Bahan Perpustakaan, Penerimaan hasil pengadaan, Pemberian Identitas Kepemilikan, Inventarisasi dan registrasi pada *Inlis-Lite*, Hasil dari *Inlis-Lite* adanya Nomor Induk, *Bib ID* dan Item *ID* menghasilkan data penyusun untuk Buku Induk dan *Accession List*, Pembuatan surat pengantar pengiriman, Persetujuan atau pengesahan surat Pengantar, Pengiriman ke Bidang Pengolahan, Pengecekan oleh *staff* Bidang Pengolahan, Serah terima bahan perpustakaan dan penandatanganan surat pengantar, Penyimpanan arsip pengiriman bahan perpustakaan. Setelah melalui setiap tahapan pada SOP Kelompok Kerja Naskah Kuno, maka prosedur proses pengadaan koleksi Naskah Nusantara dapat dinyatakan telah selesai dilakukan. Beberapa faktor pembeda dari kegiatan

pengadaan Naskah Nusantara dengan koleksi lainnya adalah kegiatan survei, indentifikasi dan verifikasi keberadaan naskah beserta kandungan isi informasi sebelum dilakukannya pengadaan. Beberapa tahapan dalam kegiatan tersebut memunculkan beberapa kendala yang kerap dialami oleh PNRI dalam proses pengadaan koleksi Naskah Nusantara.

Kegiatan ini melibatkan penerjemah yang ahli dalam bidangnya. Di mana ditemukan di lapangan dilakukan oleh bagian layanan kelompok Naskah Nusantara yang hampir seluruhnya adalah *filolog*. Latar belakang staf yang terlibat dalam kegiatan penerjemahan Naskah Nusantara memiliki dasar pendidikan Sastra Indonesia dan Sastra Jawa, yang memang menguasai bidang penerjemahan naskah kuno. Beberapa *filolog* yang terlibat juga menemukan kendala. Kegiatan verifikasi dalam pengembangan koleksi perlu dilakukan *survei* dan identifikasi terlebih dahulu. Kegiatan tersebut memerlukan akses terhadap Naskah Nusantaranya sendiri maupun kandungan informasinya yang masih sarat dengan kendala.

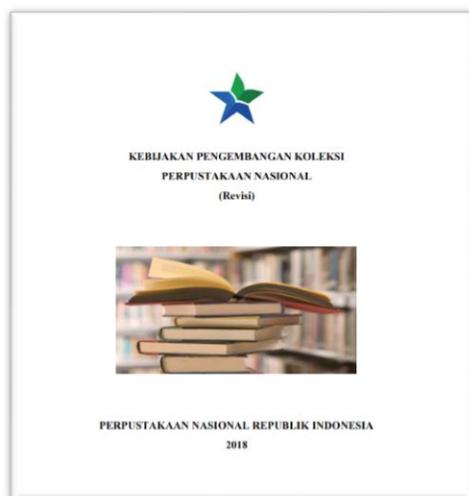
Selain kendala yang ditemukan pada akses dokumen dan kandungan informasinya. Permasalahan yang paling umum adalah anggaran untuk melakukan pembelian. Baik dari faktor *internal* PNRI sendiri dalam penyediaan anggaran pengadaan, maupun *external* dari pemilik Naskah Nusantara. Kendala yang dihadapi oleh PNRI sebagai Pusat Pernaskahan Nusantara untuk melakukan pengadaan melalui pembelian diantaranya adalah pemilik yang menganggap naskah kuno sebagai warisan budaya atau adat yang sakral hingga PNRI mendapat kendala untuk akses Naskah Nusantara baik dari segi dokumen maupun informasinya. Mahalnya mahar yang ditawarkan dalam kegiatan pembelian yang tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran. Harga mahar yang tidak dapat disanggupi oleh PNRI hingga tidak telaksananya pengadaan membuat negara tetangga yang dapat menyanggupi penyediaan dana lebih berpeluang memiliki hak sepenuhnya atas naskah tersebut. Tidak ada acuan standar harga seperti pengadaan pada koleksi monograf serta akses naskah yang sulit dikarenakan berbagai macam persyaratan seperti ritual yang harus diselenggarakan yang memerlukan biaya yang cukup tinggi serta kurangnya kesadaran pemilik akan keberadaan Naskah Nusantara menjadi kendala yang cukup signifikan dalam proses pengadaan koleksi Naskah Nusantara, yang pada akhirnya berimbas pada kelancaran proses pengembangan koleksi Naskah Nusantara.

### **3.2 Kebijakan Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) pada Naskah Nusantara**

Pengembangan koleksi merupakan kegiatan memilih dan mengadakan bahan pustaka sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan pemustaka. Salah satu bentuk koleksi yang dikembangkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) melalui kegiatan menghimpun, mendata, menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah yang sebagian besar masih tersebar di tangan masyarakat atau organisasi dan lembaga pemerhati naskah. Ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan suatu kebijakan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan permasalahan yang ada.

PNRI memiliki kebijakan pengembangan koleksi tertulis yang disusun oleh tim penyusun dan ditandatangani oleh kepala PNRI. Kebijakan tertulis yang tertuang dalam Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional revisi tahun 2018. Di dalam dokumen tertulis mengenai kebijakan pengembangan koleksi tersebut juga membahas tentang kebijakan pengembangan seluruh jenis koleksi yang salah satunya adalah manuskrip atau Naskah Nusantara.



**Gambar 1.** Dokumen Kebijakan Pengembangan Koleksi (Sumber: PNRI, 2018)

Kebijakan pengembangan koleksi di PNRI disusun berdasarkan landasan hukum. Sepuluh Landasan hukum yang tertera dalam dokumen Kebijakan Pengembangan Koleksi (2018: 2), yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 35 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Pejabat Eselon I, II, III dan IV di Lingkungan Perpustakaan Nasional RI;
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendaftaran dan pemberian Penghargaan Naskah Kuno;
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus;
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 84 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2015-2019.

Kebijakan pengembangan koleksi sebagai alat manajemen (*management tool*) yang bersifat strategis dan penting, menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan seleksi bahan perpustakaan, pengadaan, dan evaluasi koleksi PNRI secara komprehensif. Selain itu kebijakan menjadi acuan kerjasama pengembangan koleksi PNRI dengan perpustakaan lain. Seperti yang tertera pada dokumen Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional, tujuan dari adanya kebijakan pengembangan koleksi adalah mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. PNRI baru saja melakukan evaluasi yang menghasilkan pembaharuan versi revisi dari kebijakan pengembangan koleksi sebelumnya.

Kebijakan pengembangan koleksi Naskah Nusantara tidak berdiri sendiri, namun tergabung dalam kebijakan koleksi secara umum atau keseluruhan koleksi yang dikelola oleh PNRI. Dokumen Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional (Revisi) tahun 2018 terdiri dari empat bab, yang diantaranya melengkapi elemen kebijakan pengembangan koleksi seperti adalah visi dan misi, tujuan, pemustaka, penanggung jawab, kebijakan seleksi, prosedur dan prioritas, koleksi khusus, hadiah dan kerja sama, pertanyaan kekayaan intelektual dan juga penyiangan. Serta penanganan keluhan dan tantangan pada kegiatan pengembangan koleksi serta upaya penyelesaian kendala yang dialami dalam kegiatan pengembangan koleksi. Dalam dokumen Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional (Revisi) tahun 2018 juga dipaparkan tentang kebijakan pengembangan koleksi Naskah Nusantara yang meliputi cakupan dan metode pengumpulan koleksi naskah kuno, serta kerjasama

dengan pihak terkait yang berkecimpung dalam dunia naskah kuno. Penyajian kebijakan koleksi naskah kuno atau yang juga oleh PNRI disebut dengan Naskah Nusantara, terbagi sesuai dengan jenis dan bentuk koleksi yang ada, serta elemen lainnya.

Pembahasan kebijakan penembangan koleksi mengenai koleksi Naskah Nusantara terletak di beberapa bagian secara lebih spesifik yaitu pada bab dua dalam subbab “Jenis Bahan Perpustakaan” bagian tiga, “Manuskrip atau Naskah Kuno” di halaman 18 hingga 19, yang berisikan cakupan (keriteria dan prioritas) dan Pengumpulan. Serta pada bab tiga “Koleksi Indonesiana” sub-bab “Koleksi Manuskrip Nusantara dan Bahan Perpustakaan Langka” bagian manuskrip di halaman 32 sampai dengan 33, yang berisikan cakupan, pengumpulan dan kerjasama dengan lembaga terkait. Dari sub-sub bab tersebut berikut adalah isi dari kebijakan pengembangan koleksi Naskah Nusantara:

#### 1. Cakupan

Untuk pengembangan koleksi Naskah Nusantara ditentukan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan;
- b. Memiliki nilai sejarah atau budaya;
- c. Rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas (akademisi, peneliti, *filolog*.);
- d. Kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya (sejarah kepemilikan);
- e. Sesuai skala prioritas berdasarkan ketersediaan dana;
- f. Belum dimiliki oleh PNRI;
- g. Kejelasan hak cipta naskah.

#### 2. Prioritas

Berkenaan dengan anggaran yang tersedia, perlu ditetapkan prioritas dalam seleksi naskah yang akan diakuisisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan naskah satu-satunya, bukan salinan atau versi lain untuk korpus yang sama;
- b. Memiliki keunikan dalam aspek tertentu, misalnya: daerah asal naskah, aksara, bahan atau (misalnya tulang, jenis kertas, daun nipah, dan sebagainya), cap kertas, tinta yang digunakan atau *iluminasi* (hiasan);
- c. Ditinjau dari asal-usulnya, naskah yang akan diakuisisi tersebut merupakan bagian dari koleksi yang sudah dimiliki PNRI;
- d. Usia naskah (semakin tua usianya semakin menjadi prioritas).

#### 3. Pengumpulan

Dilakukan melalui penelusuran ke daerah-daerah yang diperkirakan atau diinformasikan adanya kepemilikan Naskah Nusantara yang belum dimiliki oleh PNRI. Pengembangan koleksi Naskah Nusantara PNRI dilakukan dengan:

- a. Identifikasi naskah baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Pembelian langsung kepada pemilik naskah;
- c. Bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki Naskah Nusantara baik perorangan, lembaga, maupun instansi terkait;
- d. Dalam hal tidak dapat diperoleh naskah asli, PNRI dapat memperoleh naskah hasil alih media atau salinan yang memiliki otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Serta mengupayakan pengembalian naskah yang berada di luar negeri, meski hanya reproduksinya.

#### 4. Kerjasama dengan lembaga terkait

PNRI melakukan kerjasama untuk kegiatan pengembangan koleksi Naskah Nusantara baik dengan perorangan maupun lembaga pemerhati naskah, diantara lain:

- a. Masyarakat Pernaskahan Nusantara
- b. Yayasan yang membidangi pelestarian naskah
- c. Museum
- d. Keraton
- e. Perpustakaan
- f. Arsip Nasional
- g. Lembaga yang menyimpan Naskah Nusantara di luar negeri

Kebijakan pengembangan koleksi Naskah Nusantara sendiri dalam kegiatannya lebih condong pada kegiatan akuisisi, seperti yang ditujukan bagi PNRI sebagai Pusat Pernaskahan Nusantara dengan mengumpulkan atau menyelamatkan naskah-naskah yang masih tersebar. Dilakukan melalui penelusuran ke daerah-daerah yang diperkirakan atau diinformasikan adanya kepemilikan Naskah Nusantara yang belum dimiliki oleh PNRI. Untuk pengembangan koleksi Naskah Nusantara ditentukan beberapa kriteria, berkenaan dengan anggaran yang tersedia, perlu ditetapkan prioritas dalam seleksi naskah yang akan diakuisisi pula. Serta PNRI melakukan kerjasama untuk kegiatan pengembangan koleksi Naskah Nusantara baik dengan perorangan maupun lembaga pemerhati naskah. Kebijakan pengembangan koleksi PNRI sebagai pedoman atau panduan bagi pustakawan untuk menyeleksi dan mengevaluasi pengadaan Naskah Nusantara. Sebagai acuan atau landasan serta bahan pertimbangan untuk mengadakan serta mengembangkan koleksi Naskah Nusantara.

### 3.3 Evaluasi Kebijakan Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Naskah Nusantara

Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan koleksi di Lingkungan PNRI. Untuk mengevaluasi kegiatan ini

maka perlu dilihat dari implementasi serta kebijakan yang berlaku, seperti yang tertera pada pembahasan bab sebelumnya di landasan teori bahwa penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menemukan kekuatan dalam mengerjakan peluang yang ditemukan dalam analisis penelitian ini. Analisis ini melewati tiga tahapan yaitu, mengidentifikasi seluruh faktor SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman), pembagian faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman), dan yang terakhir menemukan titik faktor *SO (Strengths-Opportunities)* untuk melihat strategi dengan menemukan kekuatan dalam mengerjakan peluang yang ditemukan.

### **3.3.1 Identifikasi Faktor SWOT Kebijakan Pengembangan Koleksi Naskah Nusantara**

Hasil dari identifikasi ini didapat dari bentuk implementasi yang didapat dari informasi yang diberikan informan. Kendala yang dijumpai pada saat kegiatan pengembangan koleksi Naskah Nusantara, yaitu tidak adanya penetapan anggaran dan standar harga yang pasti dalam akuisisi koleksi Naskah Nusantara. Sebagian besar pemilik Naskah Nusantara sadar akan berharganya warisan budaya tersebut. Namun beberapa masyarakat pemilik naskah yang masih belum sadar akan pentingnya melestarikan koleksi Naskah Nusantara. Kebijakan pengembangan koleksi Naskah Nusantara menghadapi tantangan terkait standar harga dan kesadaran masyarakat akan pentingnya naskah kuno, yang mana hal tersebut menjadi kendala yang cukup besar dalam pengembangan koleksi Naskah Nusantara, khususnya dalam pengaksesan konten naskah itu sendiri.

Pengaksesan Naskah Nusantara terkait kegiatan akuisisi pada proses verifikasi dan identifikasi naskah juga menjadi salah satu kendala bagi pemustaka. Kendala terkait pengaksesan ke Naskah Nusantara yang ada ditangan masyarakat juga dijumpai. Akses yang sulit dapat menyebabkan lamanya bahkan terhambatnya proses verifikasi dan identifikasi Naskah Nusantara. Kendala dalam pengaksesan Naskah Nusantara terkait tradisi budaya serta kepercayaan yang masih kental membuat proses akuisisi sedikit terhambat. Isu lain yang ditemukan terkait akses dan tradisi budaya yang masih kental dipegang oleh masyarakat yang menganggap naskah kuno sebagai barang suci berimbas pada perlunya penyelenggaraan ritual atau mahar tertentu yang memakan biaya yang tidak sedikit.

Kendala akses naskah kuno berimbas pula pada kurangnya dana untuk menyelenggarakan ritual atau pengadaan mahar tertentu yang diminta oleh masyarakat pemilik naskah kuno tersebut, yang berujung pada kerugian bagi PNRI karena tidak berhasil menjadikan beberapa naskah kuno sebagai koleksi dan melepaskannya pada pihak lain yang bahkan pihak lain tersebut berasal dari negara lainn. Hal ini juga

diakibatkan belum adanya kebijakan tentang besarnya anggaran untuk pengadaan dan pengembangan koleksi Naskah Nusantara.

Pada proses identifikasi faktor dalam analisis SWOT, selain ditemukan berbagai kendala dalam proses pengembangan koleksi Naskah Nusantara, juga ditemukan bahwa PNRI mempunyai faktor pendukung pada kegiatan pengembangan koleksi Naskah Nusantara seperti yang ditemukan dalam beberapa dokumen terkait pengembangan koleksi Naskah Nusantara. Seperti dokumen “Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional 2018”, “Prosiding Seminar Naskah Kuno Nusantara” serta buku “Pedoman Pengelolaan Naskah Nusantara”. Ketiga dokumen tersebut memaparkan landasan hukum yang menjadi faktor pendukung kegiatan pengembangan koleksi Naskah Nusantara, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional”. Dalam dokumen “Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional 2018” ditemukan bahwa, Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka melakukan kerjasama dengan unit kerja terkait, baik di lingkungan PNRI maupun dengan instansi lain di luar PNRI yaitu dengan:

1. Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi dalam pencacahan ulang serta survei kebutuhan pemustaka;
2. Pusat Preservasi Bahan Pustaka dalam alih media baik dari segi pelestarian maupun pengadaan Naskah Nusantara dalam bentuk salinan digital;
3. Pihak luar PNRI dalam negeri yang terkait seperti Museum Nasional, Pusat Kebudayaan Nasional dan Daerah, Kedutaan Besar negara sahabat di Indonesia, serta Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lain yang menyimpan dan memiliki informasi tentang Indonesia;
4. Serta pihak terkait di luar negeri seperti, Bibliotheek Nationale Netherland dan Koninklijk Instituut voor de Taal-Land en Volkenkunde (*KITLV*) yang banyak menyimpan koleksi Naskah Nusantara.

Selain kerjasama yang dibangun PNRI dengan pihak-pihak terkait di atas, PNRI meluncurkan pula program kegiatan pemberian penghargaan bagi pemilik Naskah Nusantara yang mendaftarkan koleksi yang dimilikinya ke PNRI. PNRI memberikan penghargaan dengan berupa pemberian dana perawatan Naskah Nusantara yang selama ini dilakukan oleh pihak pemilik naskah kuno. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan dengan harapan agar pemilik atau pemerhati Naskah Nusantara dapat terus melestarikan warisan budaya Indonesia.

**3.3.2 Pembagian Faktor IFAS (*Internal Factor Summary*) EFAS (*External Factor Summary*) Kebijakan Pengembangan Koleksi Naskah Nusantara**

Pembagian faktor-faktor yang dijabarkan pada proses identifikasi SWOT sebelumnya membagi ke dalam dua faktor yaitu internal yang didalamnya terdapat *Strengths* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan) sedangkan eksternal didalamnya terdapat *Opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) sebagai berikut:

**Tabel 2.** Tabel IFAS EFAS

<b>I F A S</b>	<b><i>Strengths</i> (kekuatan)</b>	1. PNRI memiliki beberapa dasar landasan hukum untuk memperkuat berjalannya kegiatan pengadaan.
		2. PNRI memiliki staf pustakawan berlatarbelakang <i>filolog</i> yang terlibat dalam proses pengadaan.
		3. Pusat Pengembangan Koleksi terintegrasi oleh Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi dalam kegiatan pengembangan Naskah Nusantara.
		4. Pusat Pengembangan Koleksi juga bekerjasama dengan Pusat Preservasi Bahan Pustaka dalam

		kegiatan pengembangan Naskah Nusantara.
		5. PNRI bekerjasama dengan Pusat Kebudayaan Nasional dan Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta perorangan pemerhati naskah.
		6. PNRI bekerjasama dengan Kedutaan Besar negara sahabat di Indonesia untuk akses informasi keberadaan naskah yang ada di negara tersebut.
		7. PNRI bekerjasama dengan Bibliotheek Nationale Netherland dan Koninklijk Instituut voor de Taal Land en Volkenkunde (KITLV) yang banyak menyimpan Naskah Nusantara.

	<b>Weakness (kelemahan)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya penetapan anggaran yang pasti.</li> <li>2. Proses identifikasi verifikasi Naskah Nusantara memakan waktu yang cukup lama.</li> <li>3. Tidak adanya standar harga penerbit seperti koleksi monograf lainnya.</li> </ol>
<b>E F A S</b>	<b>Opportunities (peluang)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNRI tetap dapat melakukan pengadaan salinan digital Naskah Nusantara dengan perjanjian.</li> <li>2. PNRI mempermudah akses informasi mengenai keberadaan Naskah Nusantara yang tersebar.</li> <li>3. PNRI dapat membuat daftar beberapa Naskah Nusantara yang tersebar di Indonesia maupun luar</li> </ol>

		<p>negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Program kegiatan pemberian penghargaan Naskah Nusantara dapat berjalan sepenuhnya</li> </ol>
	<b>Threats (ancaman)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negara tetangga lain yang mulai memburu Naskah Nusantara yang masih berada ditangan masyarakat.</li> <li>2. Masih adanya tradisi budaya atau adat masyarakat yang tidak memperbolehkan Naskah Nusantara berpindah tangan.</li> <li>3. Masih adanya tradisi budaya atau adat masyarakat yang mempersulit akses informasi Naskah Nusantara.</li> <li>4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Naskah Nusantara sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.</li> </ol>

Dari ke empat faktor yang telah dibagi maka langkah selanjutnya adalah Penggabungan Faktor *SO (Strengths-Opportunities)* untuk membuat alternatif strategi.

### 3.3.3 Penggabungan Faktor *SO (Strengths-Opportunities)* sebagai Alternatif Formula Strategi Kebijakan Pengembangan Koleksi Naskah Nusantara

Langkah ketiga dalam analisis SWOT yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penggabungan faktor *SO (Strengths-Opportunities)* sebagai alternatif formula strategi untuk pengembangan kebijakan yang disusun berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan dari proses indentifikasi serta pembagian faktor IFAS dan EFAS yang dibuat penyesuaian logisnya untuk menemukan alternatif strategi dari analisis ini. Berikut adalah beberapa faktor *opportunities* yang nantinya akan digabungkan oleh faktor *strengths* dalam penyesuaian faktor penentu alternatif strategis, yaitu:

1. PNRI tetap dapat melakukan pengadaan salinan digital Naskah Nusantara dengan perjanjian;
2. PNRI mempermudah akses informasi mengenai keberadaan Naskah Nusantara yang tersebar;
3. PNRI dapat membuat daftar beberapa Naskah Nusantara yang tersebar di Indonesia maupun luar negeri;
4. Program kegiatan pemberian penghargaan Naskah Nusantara dapat berjalan sepenuhnya.

Keempat faktor *Opportunities* tersebut kemudian akan digabungkan oleh beberapa faktor *Strengths* yang sesuai dengan kondisi logis faktornya dengan menggunakan kategori dasar penyesuaian *SO (Strengths-Opportunities)*. Untuk mengetahui faktor kekuatan (*strengths*) apa saja yang dapat mendukung faktor peluang (*opportunities*) yang ada. Berikut adalah Penyesuaian Faktor *SO (Strengths-Opportunities)*:

**Tabel 3.** Tabel Penyesuaian Faktor *SO*

Penyesuaian Faktor <i>SO (Strengths-Opportunities)</i>	
<i>Opportunities</i>	<i>Strengths</i>
1. PNRI tetap dapat melakukan pengadaan salinan digital Naskah Nusantara dengan	1. PNRI memiliki beberapa dasar landasan hukum untuk memperkuat berjalannya kegiatan

perjanjian.	pengadaan. 2. Pusat Pengembangan Koleksi juga bekerjasama dengan Pusat Preservasi Bahan Pustaka dalam kegiatan pengembangan Naskah Nusantara.
2. PNRI mempermudah akses informasi mengenai keberadaan Naskah Nusantara yang tersebar.	1. PNRI bekerjasama dengan Pusat Kebudayaan Nasional dan Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta perorangan pemerhati naskah.
3. PNRI dapat membuat daftar beberapa Naskah Nusantara yang tersebar di Indonesia maupun luar negeri.	1. PNRI bekerjasama dengan Pusat Kebudayaan Nasional dan Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta

	<p>perorangan pemerhati naskah.</p> <p>2. PNRI bekerjasama dengan Kedutaan Besar negara sahabat di Indonesia untuk akses informasi keberadaan naskah yang ada di negara tersebut.</p> <p>3. PNRI bekerjasama dengan Bibliotheek Nationale Netherland dan Koninklijk Instituut voor de Taal Land en Volkenkunde (KITLV) yang banyak menyimpan Naskah Nusantara.</p>
4. Program kegiatan pemberian penghargaan Naskah Nusantara dapat berjalan sepenuhnya.	<p>1. PNRI memiliki beberapa dasar landasan hukum untuk memperkuat berjalannya kegiatan pengadaan.</p> <p>2. PNRI memiliki staf pustakawan berlatarbelakang</p>

	<p><i>filolog.</i></p> <p>3. Pusat Pengembangan Koleksi terintegrasi oleh Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi dalam kegiatan pengembangan Naskah Nusantara.</p> <p>4. Pusat Pengembangan Koleksi juga bekerjasama dengan Pusat Preservasi Bahan Pustaka yang terlibat dalam kegiatan pemberian penghargaan Naskah Nusantara.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lembar kerja SWOT ini menggambarkan setiap kondisi PNRI, yang dianalisis menggunakan model perumusan matriks SWOT berbentuk tabel *IFAS (Internal Factors Analysis Summary)* dan *EFAS (External Factors Analysis Summary)* digunakan untuk menyusun faktor strategi SWOT pengembangan koleksi Naskah Nusantara. Strategi SO atau strategi kekuatan-peluang dibuat berdasarkan jalan pikiran PNRI yang menggunakan seluruh kekuatan internal PNRI untuk memanfaatkan peluang eksternal yang sebesar-besarnya dalam pengembangan koleksi Naskah Nusantara.

Berdasarkan formulasi faktor yang tertera pada tabel 3 dapat dilihat bahwa PNRI memiliki beberapa peluang yang dapat dijalankan dengan dukungan dari kekuatan yang dimiliki oleh internal PNRI sendiri, antara lain PNRI tetap dapat melakukan pengadaan salinan digital Naskah Nusantara. Walaupun dengan adanya ancaman tradisi dan budaya yang tidak

memperbolehkan naskah berpindah tangan, namun PNRI memiliki beberapa dasar landasan hukum untuk memperkuat jalannya kegiatan pengadaan sebagai ujung tombak pengembang koleksi Naskah Nusantara. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 pasal 9 butir c: “pemerintah berwenang untuk mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan”. Terkait kegiatan mengalihmediakan Naskah Nusantara, Pusat Pengembangan Koleksi juga bekerjasama dengan Pusat Preservasi Bahan Pustaka. Dalam hal ini PNRI tetap dapat melakukan pengadaan dengan naskah salinan agar kandungan informasi tetap dapat terlestarikan dan didayagunakan.

PNRI mempunyai peluang mempermudah akses informasi mengenai keberadaan Naskah Nusantara yang tersebar. Terkait dengan pemasalahan tradisi dan ritual budaya, melalui kerjasama dengan Pusat Kebudayaan Nasional dan Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta perorangan pemerhati naskah. Kerjasama ini dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan peluang melalui pendekatan ke pemangku adat maupun masyarakat, dengan ini maka PNRI juga dapat meminimalisir permasalahan terkait isu konflik dengan masyarakat pemilik naskah kuno. PNRI juga dapat membuat daftar beberapa Naskah Nusantara yang tersebar di Indonesia maupun luar negeri, melalui jaringan kerjasama dengan pihak terkait.

Program kegiatan pemberian penghargaan Naskah Nusantara yang dilaksanakan oleh PNRI berpeluang dapat berjalan sepenuhnya dengan didukung oleh beberapa kekuatan yang dimiliki oleh faktor internal PNRI sendiri, sebagai berikut:

1. PNRI memiliki beberapa dasar landasan hukum untuk memperkuat jalannya kegiatan pengadaan. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 pasal 7 ayat 1 butir i: “pemerintah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno.”
2. PNRI memiliki *filolog* yang terlibat dalam proses pengadaan, serta kegiatan seleksi pemberian penghargaan;
3. Pusat Pengembangan Koleksi terintegrasi oleh Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi dalam kegiatan pengembangan Naskah Nusantara terkait kegiatan seleksi pemberian penghargaan;
4. Pusat Pengembangan Koleksi juga bekerjasama dengan Pusat Preservasi Bahan Pustaka yang terlibat dalam kegiatan pemberian penghargaan Naskah Nusantara.

Berdasarkan seluruh proses analisis di atas PNRI dapat meminimalisir ancaman, mengatasi kelemahan dengan melihat penyesuaian logis di atas yang dapat mendukung PNRI dalam evaluasi kebijakan

pengembangan koleksi Naskah Nusantara. Melihat dari beberapa faktor kekuatan yang telah ditemukan untuk menjalankan peluang yang ada, agar kegiatan pengembangan koleksi Naskah Nusantara dapat berjalan sesuai visi dan misi PNRI sendiri.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) pada Naskah Nusantara. Maka dapat ditarik simpulan yang ditemukan dari hasil analisis SWOT bahwa, PNRI memiliki kekuatan dalam pengembangan koleksi yaitu, PNRI memiliki beberapa dasar landasan hukum untuk memperkuat jalannya kegiatan pengadaan. PNRI memiliki *filolog* yang terlibat dalam proses pengadaan. Terintegrasi oleh Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi serta Pusat preservasi dalam kegiatan pengembangan Naskah Nusantara. Serta PNRI juga bekerjasama dengan pihak luar yang terkait. Namun juga ditemukan kelemahan seperti, tidak adanya penetapan anggaran yang pasti. Proses identifikasi verifikasi Naskah Nusantara memakan waktu yang cukup lama. Tidak adanya standar harga penerbit seperti koleksi monograf lainnya.

PNRI memiliki peluang-peluang yang ditemukan seperti, PNRI tetap dapat melakukan pengadaan salinan digital Naskah Nusantara. Dapat mempermudah akses informasi mengenai keberadaan Naskah Nusantara yang tersebar. Sehingga PNRI dapat membuat daftar beberapa Naskah Nusantara yang tersebar di Indonesia maupun luar negeri. Serta Program kegiatan pemberian penghargaan Naskah Nusantara dapat berjalan sepenuhnya. Namun disisi lain ditemukan faktor yang dapat mengancam yaitu, negara tetangga lain yang mulai memburu Naskah Nusantara yang masih berada ditangan masyarakat. Masih adanya tradisi budaya atau adat masyarakat yang tidak memperbolehkan Naskah Nusantara berpindah tangan dan mempersulit pengaksesan informasi Naskah Nusantara. Serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Naskah Nusantara sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Alternatif formula strategi untuk dasar pertimbangan pengembangan dokumen kebijakan pengembangan koleksi yang dihasilkan dari analisis SWOT yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah ditentukan dari proses indentifikasi serta pembagian *Internal Faktor Summary (IFAS) Eksternal Faktor Summar (EFAS)* yang dibuat penyesuaian logisnya dapat menjadi masukan bagi PNRI dalam mengevaluasi kebijakan pengembangan koleksi di PNRI pada koleksi Naskah Nusantara untuk masa yang akan datang dengan dasar pertimbangan kekuatan dan peluang yang dimiliki PNRI dalam pengembangan koleksi Naskah Nusantara.

## Daftar Pustaka

- Almah, H. 2012. *Pemilihan dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Bahar, H., dan Mathar, T. 2015. "Upaya Pelestarian Naskah Kuno Di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan" *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 3(1), 89-100. (Online), (<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/590>).
- Ayuningtyas, Dumilah. 2013. *Perencanaan Strategis untuk Organisasi Pelayanan Kesehatan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Bryson, J. M. 2011. *Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement (Fourth Edition)*. San Francisco: Jossey-Bass Publishing Co.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi kedua)*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Jinnahtur, Anteng. 2017. "Perencanaan Strategis Pengembangan Koleksi di Perpustakaan KPw Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah". Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Pemerintahan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang perpustakaan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pendit, Putu Laxman. 2003. *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu Pengantar Diskusi Epistemologi dan Metodologi*. Jakarta: JIP-FSUI.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2012. *Prosiding Seminar Naskah Kuna Nusantara: Mewujudkan Perpustakaan Nasional sebagai Pusat Pernaskahan Nusantara*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Pedoman Pengelolaan Naskah Nusantara*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional (Revisi)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Rahmanto, Danies Widi. 2011. "Kebijakan Pengembangan Koleksi Di Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Dki Jakarta". Skripsi, Universitas Indonesia, (Online), (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20205493-S127-Kebijakan%20pengembangan.pdf>).
- Rangkuti, Freddy. 1999. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Berorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono, Blasius. 2009. *Pustakawan Cinta dan Teknologi*. Jakarta: ISIPII
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharti. 2017. "Pengembangan Koleksi Untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Di Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia". *Buletin Perpustakaan, Universitas Islam Indonesia*, (Online), (<http://journal.uin.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/9101>)
- Sukaesih, Winoto, et.all. 2016. "Preservasi Naskah Kuno sebagai Upaya Pembangunan Knowledge Management: (Studi Kegiatan Preservasi Naskah Kuno oleh Masyarakat sebagai Upaya Pembagunan Knowledge Management)". *Record and Library Journal*. 2(2), (Online), (<https://e-journal.unair.ac.id/RLJ/article/viewFile/7233/4407>).
- Sulistyo-Basuki. 1993. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarno NS. 2006. *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Sagung Seto.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat Edisi Revisi*. Jakarta: Sagung Seto.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Winoto, Yunus dan Sukaesih. 2016. "Studi tentang kegiatan pengembangan koleksi (collection development) pada perpustakaan perguruan tinggi di Wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat". *Khizanah Al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 4(2), 118-129. (Online), (<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/174>).
- Zulfitri. 2002. "Perhatian Pemerintah Dan Peran Pustakawan Dalam Pemeliharaan Naskah Kuno". *Al-Maktabah* 2(2), (Online), (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-maktabah/article/view/1583/1326>).